

MATRIK MAPPING KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN PEMUTAKHIRAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Permendagri No.90 Tahun 2019			Pemutakhiran Permendagri No.90 Tahun 2019 (Surat Bina Keuda Kemendagri tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 050/4189/Keuda )			Organisasi Perangkat Daerah	Keterangan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP b. prosentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang : Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Pembangunan lingkungan, dan Perekonomian c. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid d. Prosentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen : perencanaan , penganggaran dan pelaporan	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP b. prosentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang : Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Pembangunan lingkungan, dan Perekonomian c. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid d. Prosentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen : perencanaan , penganggaran dan pelaporan	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%	Kecamatan Balongbendo	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	a. Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	a. 100%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	a. Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	a. 100%		
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	a. Prosentase administrasi kependudukan yang diproses b. Prosentase pelayanan umum yang telah diselesaikan c. jumlah dokumen SKM yang disusun d. Jumlah Peserta sosialisasi Pelayanan Umum	a. 100% b. 100% c. 1 dokumen d. 40 orang	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	a. Prosentase administrasi kependudukan yang diproses b. Prosentase pelayanan umum yang telah diselesaikan c. jumlah dokumen SKM yang disusun d. Jumlah Peserta sosialisasi Pelayanan Umum	a. 100% b. 100% c. 1 dokumen d. 40 orang		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	a. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat yang diitindaklanjuti b. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti c. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti d. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	a. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat yang diitindaklanjuti b. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti c. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti d. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%		

	<i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	<i>a. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakatan yang diitindaklanjuti</i> <i>b. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti</i> <i>c. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti</i> <i>d. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti</i>	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%		<i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	a. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakatan yang diitindaklanjuti b. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti c. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti d. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%		
	<i>Pelaksanaan Urusan Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Prosentase pelaksanaan urusan yang dilimpahkan kepada Camat</i>	100%		<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Prosentase pelaksanaan urusan yang dilimpahkan kepada Camat</i>	100%		
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan</i>	<i>a. Prosentase SIUP usaha mikro yang diterbitkan</i> <i>b. Prosentase TDP usaha mikro yang diterbitkan</i> <i>c. Prosentase permohonan IMB Usaha Mikro yang telah diberi saran teknis</i> <i>d. Prosentase permohonan IMB Rumah Tinggal 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang telah diberi saran teknis</i>	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%		<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</i>	<i>a. Prosentase permohonan IMB Usaha Mikro yang telah diberi saran teknis</i> <i>b. Prosentase permohonan IMB Rumah Tinggal 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang telah diberi saran teknis</i>	a. - b. 100%		
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan</i>	<i>a. Prosentase monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakatan yang telah disusun laporannya</i> <i>b. Prosentase monev bidang pembangunan dan lingkungan yang telah disusun laporannya</i> <i>c. Prosentase monev bidang pemerintahan yang telah disusun laporannya</i> <i>d. Prosentase monev bidang perekonomian yang telah disusun laporannya</i> <i>e. Prosentase monev bidang ketentraman dan ketertiban umum yang telah disusun laporannya</i>	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%		<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</i>	<i>a. Prosentase monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakatan yang telah disusun laporannya</i> <i>b. Prosentase monev bidang pembangunan dan lingkungan yang telah disusun laporannya</i> <i>c. Prosentase monev bidang pemerintahan yang telah disusun laporannya</i> <i>d. Prosentase monev bidang perekonomian yang telah disusun laporannya</i> <i>e. Prosentase monev bidang ketentraman dan ketertiban umum yang telah disusun laporannya</i>	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%		
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>a. Prosentase desa yang telah mengikuti pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik</i> <i>b. jumlah kader lingkungan hidup</i> <i>c. Prosentase usaha ekonomi masyarakat yang telah mengikuti pembinaan</i> <i>d. Prosentase pedagang kaki lima yang telah mengikuti pembinaan</i>	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%		<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>a. Prosentase desa yang telah mengikuti pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik</i> <i>b. jumlah kader lingkungan hidup</i> <i>c. Prosentase usaha ekonomi masyarakat yang telah mengikuti pembinaan</i> <i>d. Prosentase pedagang kaki lima yang telah mengikuti pembinaan</i> <i>e. Prosentase SIUP usaha mikro yang diterbitkan</i> <i>f. Prosentase TDP usaha mikro yang diterbitkan</i>	a. 100% b. 100% c. 100% d. - e. 100% f. 100%		<i>Keg SIUP dan TDP geser dari sub keg Pelaksanaan urusan pemerintahan yg terkait dg pelayanan perizinan ke Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>

PROGRAM KOORDINASI KETERTIBAN UMUM		a. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti b. prosentase lembaga sosial, agama, dan masyarakat yang dibina c. persentase temuan pelanggaran perda dan konflik yang ditangani	a. 100% b. 100% c. 100%	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	a. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti b. prosentase lembaga sosial, agama, dan masyarakat yang dibina c. persentase temuan pelanggaran perda dan konflik yang ditangani	a. 100% b. 100% c. 100%		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		a. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti b. prosentase lembaga sosial, agama, dan masyarakat yang dibina	a. 100% b. 100%	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti b. prosentase lembaga sosial, agama, dan masyarakat yang dibina	a. 100% b. 100%		
	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan</i>	<i>a. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti</i>	100%	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan</i>	<i>a. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti</i>	100%		
	<i>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	<i>Prosentase lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang telah mengikuti pembinaan</i>	100%	<i>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	<i>Prosentase lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang telah mengikuti pembinaan</i>	100%		
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		a. persentase temuan pelanggaran perda dan konflik yang ditangani	100%	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	a. persentase temuan pelanggaran perda dan konflik yang ditangani	100%		
	<i>Sinergitas Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	<i>a. prosentase temuan pelanggaran perda yang ditangani b. Prosentase temuan konflik sosial yang ditangani</i>	<i>a. 100% b. 100%</i>	<i>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	<i>a. prosentase temuan pelanggaran perda yang ditangani b. Prosentase temuan konflik sosial yang ditangani</i>	<i>a. 100% b. 100%</i>		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		a. Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	1 kali	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	a. Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	1 kali		
	Penyelenggaraan Urusan sesuai Penugasan Kepala Daerah	a. Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	1 kali	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>a. Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan</i>	1 kali		

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan	a. Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	1 kali		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan	a. Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	1 kali		
<b>PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA</b>		a. Prosentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen : perencanaan , penganggaran dan pelaporan	100%	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		a. Prosentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen : perencanaan , penganggaran dan pelaporan	100%		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan		a. Prosentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen : perencanaan , penganggaran dan pelaporan	100%	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		a. Prosentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen : perencanaan , penganggaran dan pelaporan	100%		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Prosentase APBDesa yang telah dilakukan evaluasi	100%	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Prosentase APBDesa yang telah dilakukan evaluasi	100%		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		a. Prosentase desa yang telah mengikuti pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan b. Prosentase desa yang mempunyai SDM berkompeten dalam penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan	a. 100% b. 100%	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		a. Prosentase desa yang telah mengikuti pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan b. Prosentase desa yang mempunyai SDM berkompeten dalam penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan	a. 100% b. 100%		



Balongbendo, 27 Oktober 2020  
PIL. CAMAT BALONGBENDO

**ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP.MM**

Pembina  
NIP. 19790114 199711 1 001